

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aria Sujudi, et al., 2004, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2001, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia*, cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amanda, Shahnaz, 2015, “*Tinjauan Yuridis Sengketa Antara Kurator Dengan Kreditur Direktorat Jenderal Pajak Dalam Sengketa Boedel Pailit*”, *Skripsi*, Tidak dipublikasikan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok.
- Bohari, 2012, *Pengantar Hukum Pajak*, cet. 9, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2001, *Metode penelitian hukum*, Cetakan Ketiga, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, ed. 4, Refika Aditama, Bandung.
- Edward Manik, 2012, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Dilengkapi Dengan Studi Kasus Kepailitan)*, Mandar Maju, Bandung.
- Emmy Yuhassarie, 2005 *Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia, Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Fred BG Tumbuan, 2005, *Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan Dengan Kepailitan*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2010, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, cet. 4, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gross Karen, 1997, *Failure and Forgiveness: Rebalancing The Bankruptcy System*, Connecticut: Yale University Press, New Haven.
- G.P Aji Wijaya, 2005, *Peran Kurator Dalam Kepailitan dan Permasalahan yang Dihadapi Dalam Praktek*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta

Hariyani, 2018, "*Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak Atas Penagihan Hutang Pajak Wajib Pajak Yang Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 759 K/PDT.SUS-PAILIT/2016)*", Tesis. Tidak dipublikasikan, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.

Hartini, Rahayu. 2007, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang.

H. Bohari, 2006, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

HR. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

H. M. N. Purwosutjipto, 1992, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, seri. 8, cet. 3, Djambatan, Jakarta.

Jordan, Robert L., et al., 1999, *Bankruptcy*, Foundation Press, New York

J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Kartini Mulyadi, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, PT. Alumni, Bandung.

Kartini Mulyadi, 2005, *Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan, Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Pengkajian Hukum*, Jakarta.

Marihot P. Siahaan, 2004, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mamudji, Sri, et al., 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

M. Hadi Shubhan, 2014, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, cet. 4, Kencana, Jakarta.

Moeljo Hadi, 2001, *Dasar-dasar Penagihan Pajak dengan Surat Paksa oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah*, cet. 4, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Nating, Imran, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, 2005, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Ned Waxman, 1992, *Bankruptcy*, Gilbert Law Summaries, Harcourt Brace Legal and Professional Publication, Inc., Chicago.

Nurmantu, Safri. 2003, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta.

- Purwosutjipto, H. M. N., 1992, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, seri. 8, cet. 3, Djambatan, Jakarta.
- Rachmat Bastian, 2005, *Prinsip Hukum Kepailitan Lintas Yurisdiksi*, Dalam Emmy Yuhassarie, *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Rahayu Hartini, 2007, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang.
- Ricardo Simanjutak, 2005, *Ketentuan Hukum Internasional dari UU Nomor 4 Tahun 1998 dalam Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Robert L. Jordan, et al., 1999, *Bankruptcy*, Foundation Press, New York.
- Rochmat Soemitro, 1998, *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, ed. Revisi, cet. 5, Refika Aditama, Bandung.
- R. Santoso Brotodihardjo, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet. V, Alumni, Bandung.
- Safri Nurmantu, 2003, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta.
- Salim HS, 2016, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada.
- Shahnaz Amanda, 2015, *Tinjauan Yuridis Sengketa Antara Kurator Dengan Kreditur Direktorat Jenderal Pajak Dalam Sengketa Boedel Pailit*, Skripsi, Tidak dipublikasikan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok.
- Shubhan, M. Hadi, 2014, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, cet. 4, Kencana, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2010, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, cet. 4, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Soebekti, 1989, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. 22, s.l.: Intermasa, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.

Sri Mamudji, et al., 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Sri Soedewi Mascjoen Sofwan, 2001, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta

Sujudi, Aria, et al., 2004, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta

Sutan Remy Sjahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Sutan Remi Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordering Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Grafiti, Jakarta.

Syamsudin M. Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta.

Wijaya, G.P Aji, 2005, *Peran Kurator Dalam Kepailitan dan Permasalahan yang Dihadapi Dalam Praktek*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Yulianto, 2017, *Pembatasan Hak Bank Selaku Kreditor Separatis dalam Proses Kepailitan*, Rawajali Pers, Depok.

Y. Sri Pudyatmoko, 2007, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

Zainal Asikin, 2001, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia, cet. 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2011, Sinar Grafika, Jakarta

PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Menteri Republik Indonesia Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016, tentang Pedoman Imbalan Jasa Kurator,

PUTUSAN PENGADILAN:

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XI/2013.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Menteri Republik Indonesia Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016, tentang Pedoman Imbalan Jasa Kurator,

INTERNET:

International Legislative Guide on Insolvency Law, 2005, hal 21, diunduh dari www.uncitral.org/pdf/englis/texts/insolven/05-80722_Ebook.pdf, terjemahan terdapat dalam Prosiding Seminar Nasional Kepailitan Tahun 2008.

Bisnis Indonesia, 25 Juni 2008, Sikap Ambivalen Pengadilan Menyulitkan Tugas Kurator, <http://www.pajakonline.com/engine/artikel/art.php?artid=2438>, diunduh pada 7 November 2019.